



## Determinan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Sita Ayu Ningrum<sup>1</sup>, Siti Sundari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

<sup>1</sup>sitaayu89@gmail.com, <sup>2</sup>sitisundari.ak@upnjatim.ac.id

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Diterima 12 Juni 2022

Disetujui 20 Agustus 2022

Diterbitkan 25 Agustus 2022

### Kata kunci:

Implementasi *good governance*; Kompetensi aparatur; Sistem pengendalian *intern* pemerintah; Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

### Keywords :

Implementation of *good governance*; Apparatus competence; Government internal control system; Quality of local Government financial reports

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh implementasi *good governance*, kompetensi aparatur, dan sistem pengendalian *intern* pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Obyek penelitian ini adalah semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berbentuk dinas dan badan Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Populasi penelitian meliputi 207 aparatur dinas dan badan yang terlibat dalam bidang pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *simple random sampling*. Pengumpulan data diadakan melalui sebar kuisioner, sedangkan teknik analisis data menggunakan SEM PLS dengan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *good governance*, kompetensi aparat dan sistem pengendalian *intern* pemerintah memiliki kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan semakin implementasi *good governance*, kompetensi aparatur dan sistem pengendalian *intern* pemerintah maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya akan semakin meningkat.

### ABSTRACT

*This study aims to examine the effect of the implementation of good governance, competence of the apparatus, and the government's internal control system on the quality of the Surabaya City Government's financial reports. The research method used is quantitative. The object of this research is all Regional Apparatus Organizations (OPD) in the form of services and agencies of the Surabaya City Government. The research population includes 207 government officials and agencies involved in financial management in the Surabaya City Government. The sampling technique used is simple random sampling method. Data collection was carried out by distributing questionnaires, while the data analysis technique used SEM PLS with SmartPLS software. The results of this study indicate that the implementation of good governance, the competence of the apparatus and the government's internal control system have contributed to the quality of the financial reports of the Surabaya City Government. This shows that the higher the implementation of good governance, the competence of the apparatus and the government's internal control system, the quality of the financial reports of the Surabaya City government will increase.*



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY

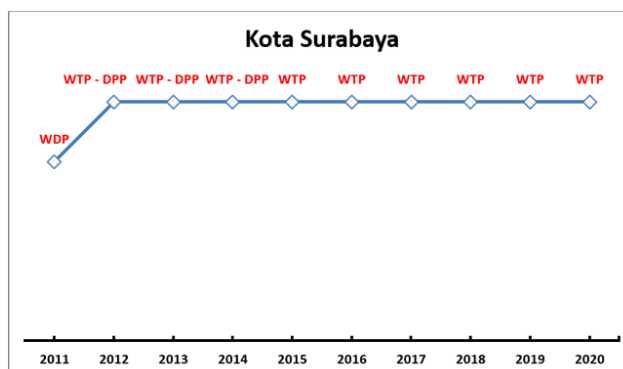
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Dewasa ini, pembangunan sektor publik di Indonesia dicapai melalui akuntabilitas publik lembaga sektor publik (Rahmawati, 2017). Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan informasi tentang kinerja keuangan pemerintah dan kinerja pegawainya. Hal ini sejalan dengan keinginan masyarakat kepada pemerintah untuk menjamin transparansi informasi dan mencegah penyimpangan. Transparansi dan akuntabilitas berjalan seiring dengan bagaimana pemerintah menghasilkan laporan berkualitas tinggi. Pelaporan keuangan menjadi titik fokus untuk mengevaluasi pengelolaan sistem pemerintahan. Kualitas pelaporan keuangan selalu menjadi perhatian dalam perkembangan sistem pemerintahan. Praktik pelaporan keuangan yang diatur mengharuskan pemerintah untuk menyiapkan laporan keuangan yang berisi informasi berkualitas tinggi yang tersedia untuk publik.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja anggaran pemerintah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017). Hasil laporan yang disusun oleh pemerintah daerah dapat dijadikan dasar bagi pelapor keuangan untuk mengambil keputusan (Vifo, 2019). Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Dalam

paragraf 35 tentang SAP, termasuk laporan keuangan pemerintah, yang memuat laporan keuangan dengan empat karakteristik: relevansi, komparabilitas, dan aksesibilitas..



**Gambar 1. Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya**  
Sumber: (jatim.bpk.go.id, 2020)

Seperti yang ditunjukkan, Kota Surabaya mendapat peringkat sangat wajar (WDP) pada tahun 2011, menurut ulasan BPK atas laporan keuangan terbaru pemerintah Kota Surabaya di situs resmi BPK Jawa Timur. Sementara itu, pada tahun 2012, Kota Surabaya menerima laporan WTP-DPP yang menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan di Surabaya telah membaik. Pada awal tahun 2015, Kota Surabaya mendapatkan penilaian ketidaksesuaian (WTP). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah di Surabaya mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga 2020.

Dalam praktiknya, meskipun Kota Surabaya telah terdaftar sebagai WTP selama sembilan tahun berturut-turut, BPK masih menghadapi kesulitan dalam mengelola pelaporan keuangan (jatim.bpk.go.id, 2021). Adanya permasalahan tersebut tentunya akan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Surabaya. Sebagaimana dijelaskan dalam (Prayoga S., 2021), BPK mengidentifikasi masalah yang mempengaruhi sistem pelaporan keuangan yang dapat menyebabkan potensi kerugian.

Hasil WTP yang dicapai Kota Surabaya secara intrinsik terkait dengan beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya manusia, pengendalian internal, akuntansi dan faktor lainnya (Pone, 2018). Penggunaan sistem pengendalian internal, kebijakan dan sistem pemerintah yang baik merupakan faktor yang meningkatkan pengendalian pelaporan keuangan untuk mencapai kualitas pelaporan keuangan.

Tata pemerintahan yang baik adalah harapan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah di sektor publik memerlukan sistem tata kelola yang baik berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Keberhasilan penerapan tata kelola yang baik dapat didasarkan pada beberapa faktor, yaitu adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat meningkatkan pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang ada (Anggreni & Asri Dwija Putri, 2018).

Keseriusan Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan good governance tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan. Otoritas publik harus memiliki tingkat kompetensi yang tinggi dan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang tinggi. Juga dapat menentukan apakah penyajian laporan keuangannya sudah akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lembaga yang berkompeten tinggi memainkan peran penting dalam penyusunan laporan keuangan, karena mereka harus memastikan bahwa laporan keuangan yang diberikan mengandung informasi yang berkualitas tinggi.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memberikan keyakinan bahwa proses pengelolaan anggaran dapat efektif dan efisien, terutama dalam hal menghasilkan laporan keuangan yang andal. Dengan diterapkannya sistem pengendalian internal, pemerintah menciptakan aktivitas ketidakpatuhan, yang meningkatkan objektivitas informasi, mencegah inkonsistensi dan menyederhanakan proses pelaporan keuangan (Lumongga, 2017).

## METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini mensurvei 207 pengelola dan lembaga keuangan di Surabaya, yang terdiri dari 18 lembaga dan 6 lembaga. Lembaga dan dinas daerah dipilih sebagai wakil lembaga daerah karena lembaga dan dinas daerah merupakan unsur pelaksana dan penunjang penyelenggaraan lembaga daerah, serta memiliki prinsip otonomi daerah dan pengelolaan bersama. Metode pengambilan sampel menggunakan sampel acak sederhana menurut rumus Slovenia dengan jumlah sampel 67 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui diseminasi. Teknologi analisis SEM-PLS dengan SmartPLS 3.0. perangkat lunak.

### Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel kompetensi, kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dan tiga variabel yaitu: penerapan good governance dan sistem pengendalian intern lembaga dan pemerintah.

### Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Indikator pelaporan keuangan pemerintah daerah diukur terhadap empat indikator dalam SAP paragraf 35: Relevan, Andal, Sebanding, dan Kompeten. Alat Kualitas Pelaporan Keuangan Kota diukur menurut penelitian (Ansar, 2018) di mana 10 pertanyaan dirumuskan.

### Implementasi good governance (X1)

Indikator good governance diukur dengan menggunakan sembilan indikator (UNDP, 1977), yaitu: partisipasi, transparansi, kepastian hukum, akuntabilitas, fokus pada kesepakatan, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. Menurut (Rusdiana, 2020) dan (Ikhsan, 2018), alat-alat berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik diukur dan ditambahkan 17 pertanyaan tambahan.

### Kompetensi aparatur (X2)

Indikator kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan 5 indikator (Pratama, 2018), yaitu: pengetahuan dan pelatihan, keterampilan, sikap (pengendalian sumber daya manusia), pemahaman peraturan dan standar, dan interaksi dengan sistem. Alat ukur instrumental ini berdasarkan penelitian (Pavitasari, 2018) dan Pone (Pone, 2018), dengan total 16 soal yang dikembangkan.

### Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3)

Indikator sistem pengendalian intern diukur dengan lima indikator yaitu lingkungan pengendalian, pengaruh, pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengendalian intern sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Alat Ukur Sistem Pengendalian Intern didasarkan pada survei 16 pertanyaan oleh (Amarini, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis**

Hubungan antar variabel	Original sampel (O)	T-Statistics	P-Values	Hasil
Implementasi good governance (X1) → Kualitas LKPD (Y)	0.293	1.784	0.038	H1 diterima
Kompetensi aparatur (X2) → Kualitas LKPD (Y)	0.295	2.020	0.022	H2 diterima
Sistem pengendalian intern pemerintah	0.341	3.380	0.000	H3 diterima

Hubungan antar variabel	Original sampel (O)	T-Statistics	P-Values	Hasil
(X3) → Kualitas LKPD (Y)				

Sumber: hasil analisis SEM-PLS

### **Pengaruh Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Surabaya. Hal ini terlihat dari p-value  $0,038 < 0,05$  yang menunjukkan penerimaan H1. Semakin baik dan semakin konsisten penerapan good governance, semakin tinggi kualitas pelaporan keuangan kota. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah Surabaya untuk menerapkan tata kelola yang baik untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

OPD Kota Surabaya menerapkan good governance sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yaitu partisipasi, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, orientasi kepastian hukum, imparialitas, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, strategic foresight. Ini berkontribusi pada kemajuan sosial dan kemakmuran keuangan publik. Dalam pengelolaan keuangan publik, penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik tidak terlepas dari transparansi dan akuntabilitas sebagai pedoman untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian ini mendukung temuan sebelumnya oleh Swastika & (Swastika & Sari Widhiyani, 2020) bahwa good governance berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Kabupaten Jembrana. (Philadelphphia *et al.*, 2020) penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik berdampak pada kualitas pelaporan keuangan di pemerintah Kabupaten Klatten, semakin mendukung temuan penelitian ini.

### **Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan peralatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Surabaya yang ditunjukkan dengan nilai p-value  $0,022 < 0,05$  yang menunjukkan penerimaan H2. Semakin tinggi kapasitas kelembagaan, semakin tinggi kualitas pelaporan keuangan kota. Perangkat dengan keterampilan SDM yang baik memainkan peran yang sangat penting dalam menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi karena menerapkan logika akuntansi dengan benar dan akurat. Individu yang kompeten juga menggunakan pengetahuannya untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, menggunakan keterampilannya untuk melakukan tugasnya dengan benar dan akurat, menghindari kesalahan dengan menerapkan prinsip akuntansi, dan memperlakukan orang lain dengan baik. Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Putri (Putri, 2019) bahwa kapasitas lembaga berpengaruh positif terhadap kualitas sistem keuangan daerah pemerintah Bandung Barat. Ahmad dkk. (Ahmad *et al.*, 2020) mendukung temuan penelitian ini dan menunjukkan bahwa kapabilitas lembaga dan sistem pengendalian internal memiliki dampak positif dan signifikan secara langsung dan tidak langsung terhadap kualitas penelitian. Namun studi dan penelitian ini menyimpulkan bahwa kapasitas instansi pemerintah daerah tidak mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan Kota Kendari.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Surabaya. Hal ini terlihat dari nilai p-value  $0,000 < 0,05$  yang menunjukkan penerimaan H3. Semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin baik pula kualitas pelaporan keuangan daerah. Sistem pengendalian intern pemerintah yang baik meliputi lima aspek utama: lingkungan pengendalian, risiko, aktivitas, informasi dan komunikasi, dan pengawasan pengendalian intern. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Hia *et al.* (Hia *et al.*, 2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kota Sinhas. Artinya, selain memperbaiki sistem pengendalian intern pemerintah, juga memperbaiki sistem pengendalian intern pemerintah. Tambahkan akun tahunan.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu implementasi *good governance* memberikan kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Artinya semakin baik dan konsisten implementasi *good governance*, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya akan semakin meningkat. Kompetensi aparatur memberikan kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kompetensi aparatur, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya akan semakin meningkat. Sistem pengendalian *intern* pemerintah memberikan kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Artinya jika sistem pengendalian *intern* pemerintah semakin baik, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya akan meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I., Mahfudnurnajamuddin, Mas'ud, M. & Suriyanti 2020. Competencies of Apparatus and Internal Control System Effect on The quality of Financial Statement Information and Good Governance. *European Journal of Business and Management Research*, 5(4): 1–6.
- Amarini, N. 2018. Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Anggreni, N.M.M. & Asri Dwija Putri, I.G.A.M. 2018. Pengaruh Good Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 2018(1): 352–380.
- Ansar, S.B. 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Eisenhardt, K.M. & Eisenhardt, K.M. 2018. Linked references are available on JSTOR for this article : Agency Theory : An Assessment and Review. *Academy of Management*, 14(1): 57–74.
- Hia, I.J., Erlina & Sirojuzilam 2020. Analysis of the Effect of the Government Internal Control System (GICS), Implementation of Government Accounting Standards (GAS), Compliance with Legislation and Regional Asset Management on the Quality of West Nias Regency Government Financial Reports. *International Journal of Research*, 7(11): 31–37.
- Ikhsan, M. 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Skpd Kota Medan. Medan: Universitas Sumatera Utara Medan.
- jatim.bpk.go.id 2020. Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- jatim.bpk.go.id 2021. 9 Kali Berturut-turut Pemkot Surabaya Sukses Pertahankan Opini WTP dari BPK.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia 2017. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyusunan LKPP. 31 Oktober.
- Lumonga 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan. Universitas Sumatera Utara.
- Lynda, Asnawi, M. & Pangawow, B.J.C. 2019. Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Penelitian Pada Pemerintah Daer. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 2(2): 18–38.
- Mene, R.E., Karamoy, H. & Warongan, J.D.. 2018. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04): 133–143.
- Novi, P. 2018. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Wonogiri). Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Pavitasari, E. 2018. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009. Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat.
- Philadelphiala, I.S., Suryaningsum, S. & Sriyono, S. 2020. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya

- Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 2(1): 17–35.
- Pone, S.M.R. 2018. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik (Studi Empiris Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT). Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Pratama, F.K.O. 2018. Pengaruh Pemberdayaan dan Kompetensi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di PT Kereta Api Daops II Bandung. Unpas Bandung.
- Prayoga S., F.M. 2021. Pengaruh Penyelenggaraan Good Governance, Penerapan E- Budgeting, dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). UPN Veteran Jatim.
- Putri, D.R. 2019. Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat). elibrary unikom.
- Rahmawati, E. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten PATI). Fakultas Ekonomi Unissula.
- Rusdiana, Y.E. 2020. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 01. Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Scott, W.R. 2015. *Financial Accounting Theory* Sevent Edition. Toronto: Pearson.
- Sedarmayanti 2017. *Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja dan Produktivitas Kerja*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Swastika, I.B.P.J. & Sari Widhiyani, N.L. 2020. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah, Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Jembrana. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11): 2724.
- Trisnawati, N.N. & Wiratmaja, D.N. 2018. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 24: 768.
- Vifo 2019. Analisis Ketergantungan Keuangan Daerah, Efektivitas Paddan Rasio Pertumbuhan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Wibowo 2016. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada